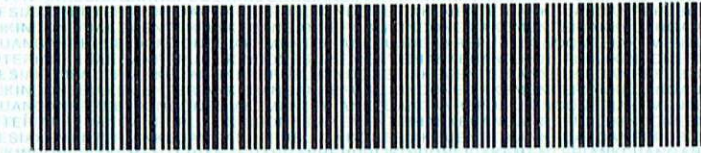




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099226/2016**



DS:6727-5947-5700-3093

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (11) | SUMATERA SELATAN |
| 4. Kode/Nama Satker | : (099226) | PENGADILAN NEGERI PALEMBANG |
| Sebesar | : Rp. | 162.776.000 (SERATUS ENAM PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- | | |
|-------|-------------------------|
| 03 | KETERTIBAN DAN KEAMANAN |
| 03.04 | PERADILAN |

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- | | |
|----------------|--|
| 005.03.07 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |
| 005.03.07.1049 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum |

	Jumlah Uang
Rp.	162.776.000
Rp.	162.776.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 162.776.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNPB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN PALEMBANG | (014) Rp. | 162.776.000 |
|-------------------|-----------|-------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

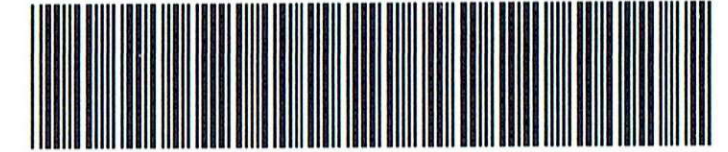
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.



Jakarta, 07 Desember 2015
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttt.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2016
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:6727-5947-5700-3093

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Kuasa Pengguna Anggaran : JULI ASTRA.,SH
Bendahara Pengeluaran : BENY HERLAMBAANG, SH
Pejabat Penanda Tangan SPM : NAIN MEITULU, SH

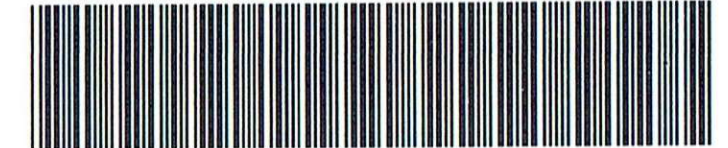
Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		162.776.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		162.776.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		162.776.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		162.776.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah pedoman tata kelola di lingkungan peradilan umum		
	002	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis administrasi peradilan		
	003	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan umum		
	004	Jumlah pelaksanaan pengawasan pelayanan publik peradilan umum		
	005	Jumlah pelayanan peradilan di lingkungan Peradilan Umum		
	006	Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum		
	007	Pelaksanaan Zitting Plaatz/Sidang diluar Pengadilan/Sidang Terpadu		
Keluaran (Output)	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	880,00 Jam Layanan	58.250.000
	1049.005	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	2.000,00 Perkara	85.245.000
	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	30,00 Perkara	19.281.000

Jakarta, 07 Desember 2015
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2016**



DS:6727-5947-5700-3093

IB.SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Halaman : IB. 1

1. Anggaran Tahun 2016	Rp.	162.776.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	162.776.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNBPN	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2016
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6727-5947-5700-3093

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	-	162.776	-	-	-	162.776		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	162.776	-	-	-	162.776		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	162.776	-	-	-	162.776		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	58.250	-	-	-	58.250	11 . 51	
01	RM	-	58.250	-	-	-	58.250	014	
1049.005	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	85.245	-	-	-	85.245	11 . 51	
01	RM	-	85.245	-	-	-	85.245	014	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	-	19.281	-	-	-	19.281	11 . 51	
01	RM	-	19.281	-	-	-	19.281	014	
	JUMLAH	-	162.776	-	-	-	162.776		

Jakarta, 07 Desember 2015
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2016
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6727-5947-5700-3093

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (099226) PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

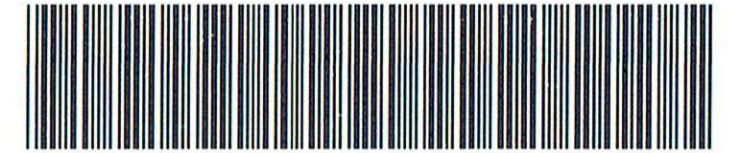
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	099226	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.498	3.321	5.827	8.920	9.376	10.418	18.084	17.596	19.077	19.468	21.796	27.395	162.776
		52 BELANJA BARANG	1.498	3.321	5.827	8.920	9.376	10.418	18.084	17.596	19.077	19.468	21.796	27.395	162.776
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.498	3.321	5.827	8.920	9.376	10.418	18.084	17.596	19.077	19.468	21.796	27.395	162.776
		52 BELANJA BARANG	1.498	3.321	5.827	8.920	9.376	10.418	18.084	17.596	19.077	19.468	21.796	27.395	162.776

Jakarta, 07 Desember 2015
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099226/2016
IV. C A T A N**



DS:6727-5947-5700-3093

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [099226] PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Halaman : IV. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2015
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004